

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan perusahaan yang memuat informasi tentang neraca, laba rugi, perubahan modal, arus neraca dan juga CALK pada periode tertentu yang bisa digunakan pemakai laporan keuangan untuk membuat kebijakan, hal ini lah salah satu bentuk akuntabilitas yang disediakan oleh manajemen. Tujuan laporan keuangan yakni menjadi media penyedia informasi yang dapat dipakai oleh investor dan kreditur pada saat pengambilan keputusan investasi dan pemberian kredit kepada perusahaan secara rasional (FASB,1978). Di Perusahaan laporan keuangan memiliki peran yang sangat krusial karena itu manajemen berupaya untuk menyusun laporan keuangan secara akurat dan relevan sehingga memberikan gambaran kinerja yang baik untuk perusahaan.

Top management atau manajemen puncak merupakan kelompok tertinggi yang terdiri dari sekumpulan kelompok kecil eksekutif yang bertugas untuk Menyusun rencana kegiatan serta strategi perusahaan secara global dan bertugas untuk mengarahkan jalannya aktivitas perusahaan. keahlian utama yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat ini yakni keahlian dalam hal komunikasi, manajemen global, manajemen waktu, konseptual serta pengambilan keputusan. *Top management* yang merupakan pihak pemangku jabatan dengan posisi yang strategis memiliki tanggungjawab untuk mengelola perusahaan serta melaporkan hasil kinerja perusahaan selama periode tertentu kepada para

pemangku kepentingan (Annisa, 2017). Selama menjalankan aktivitas bisnisnya, suatu perusahaan haruslah menerapkan etika bisnis agar mampu mengurangi terjadinya praktik kecurangan yang manajemen perusahaan lakukan dalam menyajikan laporan keuangan.

Menurut utami (2017) tujuan dari etika bisnis yang diterapkan di perusahaan adalah untuk mendorong kesadaran serta memberikan batasan-batasan kepada manajemen perusahaan atau pelaku bisnis agar dapat menjalankan kegiatan bisnisnya dengan baik atau *good business* serta tidak melakukan bisnis kotor (*dirty business*) atau *monkey business* yang dapat merugikan berbagai pihak. Pihak-pihak yang dapat dirugikan karena adanya pelanggaran terkait etika bisnis yakni *stakeholder* perusahaan yang terdiri dari investor, pemerintah, pemilik perusahaan, karyawan perusahaan, pemilik serta masyarakat yang secara langsung ataupun tidak langsung mempunyai kepentingan dengan perusahaan.

Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang secara sadar serta sengaja untuk melakukan kecurangan yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dengan cara yang salah, dimana tindakan *fraud* yang telah dilakukan tersebut dapat merugikan orang lain. *Association of Certified Fraud Examinier* mengkatagorikan *fraud* ke dalam 3 cabang utama yang terdiri dari *corruption*, *asset misappropriation* dan *fraudulent statement* (ACFE, 2016). Seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya disebut dengan korupsi atau *corruption*. Seseorang yang memiliki tanggung

jawab untuk mengelola dan mengawasi asset tetapi melakukan suatu tindakan kecurangan pengambilan asset tersebut secara illegal merupakan pengertian dari *asset misappropriation*. *Fraudulent statement* merupakan tindakan kecurangan pelaporan keuangan yang dimana seseorang secara sengaja melakukan penyembunyian (*omission*) atau melakukan kekeliruan dalam penyajian (*misstatement*) yang dipakai guna megecoh pemakai laporan keuangan. Kecurangan pelaporan keuangan terjadi disebabkan oleh manajemen yang mempunyai tugas untuk menyusun laporan keuangan secara sengaja melakukan kecurangan yang dapat menyebabkan terjadinya salah saji material di laporan keuangan perusahaan (Annisya, dkk., 2016).

Dalam Pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan ada beberapa model yang dapat dipakai yakni; (1) *Beneish M-score* adalah model yang dipakai dalam membuat prediksi mengenai kecurangan pelaporan keuangan yang dikembangkan dengan memakai *logit regression*, dimana dalam model ini terdapat delapan rasio keuangan terkandung dalam model yang dapat ditentukan serta diuji dengan menggunakan *principle component analysis* (Beneish, 1999). (2) *F-score* adalah model yang dipakai dalam pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan yang dikembangkan dengan menggunakan teknik *scaled logistic probability* (Dechow, dkk., 2011), *F-score model* adalah pengembangan dari model *Beneish M-score* yang di buat secara khusus agar pengguna mampu memperoleh nilai atau *score* secara langsung tanpa menggunakan indeks dalam perhitungannya. Dan (3) *Restatement* merupakan penyajian kembali laporan keuangan yang disebabkan adanya kesalahan dasar, transaksi dengan pihak istimewa, reklasifikasi, serta penyajian yang bukan

dikarenakan adanya perubahan kebijakan serta estimasi akuntansi yang diakibatkan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. *Restatement* yang dilakukan oleh perusahaan menjadi sinyal atau tanda terhadap kecurangan pelaporan keuangan, sehingga bisa dipakai untuk pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan (Salavei dan Moore, 2005). Model *Beneish M-score* serta *F-score* memiliki kelemahan yakni cenderung *understatement* jika laporan keuangan tidak memiliki data yang dibutuhkan untuk menghitung nilai *M Beneish* dan nilai *F*. Meskipun demikian pengguna laporan keuangan tetap dapat mengidentifikasi *red flag* dengan melihat tren pergerakan nilai *M Beneish* dan nilai *F* (Hugo, 2019). Ak, dkk. (2013) mengatakan bahwa *F-score* adalah metode penelitian terkait risiko kecurangan pelaporan keuangan yang memiliki nilai akurasi yang tinggi sehingga metode ini baik untuk digunakan dalam pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan.

Badan Usaha Milik Negara merupakan organisasi pemerintah yang menjadi di binaan Kementerian BUMN Republik Indonesia. Berdasarkan penelitian *Association of Certified Fraud Examinier* tahun 2016 di Indonesia, lembaga yang paling dirugikan akibat *fraud* adalah 81,2% berasal dari lembaga pemerintah, kemudian 8,1% berasal dari lembaga perusahaan negara atau BUMN dan 2,3% berasal dari Lembaga swasta, sedangkan untuk sektor industri yang paling dirugikan akibat *fraud* yakni 58,8% berasal dari perusahaan-perusahaan yang berstatus BUMN (ACFE Indonesia, 2016).

Menurut data yang terdapat pada situs Kementerian BUMN pada tahun 2020, terdapat 115 perusahaan negara yang menjadi milik Kementerian BUMN yang terbagi menjadi 96 badan usaha yang tidak terdaftar dan 20 BUMN yang

terdaftar di BEI (Kementrian BUMN, 2020). Sumber modal dari BUMN yang terdaftar di BEI berasal dari suntikan dana pemerintah dan investasi yang dilakukan oleh *stakeholder* yang dimana pemerintah dan *stakeholder* mengharapkan adanya keuntungan dari modal yang mereka berikan berupa laba dan deviden. Apabila kinerja yang dimiliki BUMN melemah secara terus menerus, maka akan memberikan dampak pada pendapatan yang menurun setiap tahunnya, sehingga untuk menjalankan aktivitas operasional badan usaha membutuhkan dana ekstra, baik yang bersumber dari dana pemerintah dan *stakeholder* itu sendiri maupun pinjaman utang dari kreditur. Pemerintah dan *stakeholder* akan memberikan dana apabila kinerja badan usaha dalam keadaan yang baik, hal tersebut akhirnya menyebabkan banyak BUMN yang melaksanakan kecurangan yang bertujuan agar kinerja keuangan yang ada di laporan keuangan terlihat dalam keadaan yang baik, sehingga pemerintah dan *stakeholder* tetap memberikan suntikan dana dan percaya terhadap kinerja badan usaha tersebut.

Thohir (2020) menyatakan bahwa saat ini sering terjadi manipulasi laporan keuangan atau *window dressing* pada BUMN. Badan Usaha seolah-olah meraih keuntungan tetapi nyatanya tidak memiliki dana sesuai dengan apa yang mereka laporkan pada laporan keuangan. Kasus kecurangan pelaporan keuangan di BUMN yang banyak diperbincangkan adalah kasus kecurangan yang terjadi di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018. Kantor akuntan publik yang saat itu memiliki tugas untuk mengaudit laporan keuangan terlibat dalam praktik kecurangan yang perusahaan lakukan. Dampaknya adalah akuntan publik tersebut memperoleh hukuman dari Menteri Keuangan yakni pembekuan

izin selama satu tahun. Selain itu susunan direksi serta komisaris yang terlibat pada kasus ini juga mendapatkan sanksi dari OJK dan BEI (Hartomo, 2019). Kasus lainnya terjadi di PT Timah Persero TBK tahun 2015 (Soda, 2016). PT Indofarma Persero TBK tahun 2001 (*Finance*, 2004) dan PT Kimia Farma Persero TBK tahun 2001 (Syahrul, 2003). Kasus-kasus yang pernah terjadi tersebut tentu dapat mencoreng citra baik yang dimiliki badan usaha itu sendiri maupun pemerintah yang gagal untuk mengawasi kinerja BUMN.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya kecurangan pelaporan keuangan suatu perusahaan dibutuhkan suatu alat yang dapat dipakai saat pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan. Teori *pentagon fraud* adalah salah satu teori yang dapat dipakai dalam pendeteksian kecurang pelaporan keuangan. Teori ini terdiri lima faktor penyebab terjadinya kecurangan yakni tekanan, peluang, rasionalisasi, kompetensi serta arogansi (Marks, 2012). Dipilihnya teori *pentagon fraud* dalam penelitian ini, dikarenakan teori ini adalah penyempurnaan dari teori yang telah di temukan oleh Cressey tahun 1953 yakni *triangle fraud* serta *diamond fraud* yang dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson tahun 2004. Marks (2012) menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab seseorang melakukan *fraud* tidak hanya dipengaruhi oleh faktor tekanan, peluang, rasionalisasi dan kompetensi melainkan juga dipengaruhi oleh faktor arogansi.

Menurut Wardhani (2018) Suatu dorongan yang disebabkan oleh suatu keadaan yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan kecurangan pada *pentagon fraud* disebut dengan faktor tekanan. *American Institute of Certified Publik Accountant* (2002) menyatakan jika kecurangan pelaporan keuangan

bisa terjadi dikarenakan manajemen perusahaan memperoleh tekanan dari pihak eksternal yang mendorongnya untuk melakukan kecurangan yang dapat disebabkan oleh keadaan ekonomi, industri serta situasi lainnya.

Ketika perusahaan sedang dalam keadaan ekonomi yang terancam manajer akan berupaya untuk menutupi keadaan ekonomi perusahaan dengan cara melakukan pinjaman kredit (hutang) pada bank, pihak ketiga maupun pihak lainnya. Pada saat manajemen perusahaan melakukan pinjaman kredit maka akan berdampak pada rasio *leverage* yang semakin meningkat. Rasio *leverage* yakni kapasitas perusahaan untuk membayar semua utang perusahaan dengan memakai semua asset perusahaan. Ketika perusahaan mempunyai hutang yang semakin meningkat, maka rasio *leverage* juga semakin meningkat yang menyebabkan risiko kredit perusahaan juga semakin tinggi. Apabila perusahaan mengalami kerugian yang besar biasanya untuk menutupi hal tersebut perusahaan akan melakukan kecurangan pelaporan keuangan sehingga kinerja perusahaan akan terlihat dalam kondisi yang baik sehingga pemerintah dan *stakeholder* tetap percaya terhadap kinerja perusahaan (Agustina dan Pratomo, 2019).

Penggunaan proksi rasio *leverage* ini mengacu pada hasil penelitian Rusmana dan Tanjung (2019), serta Tessa dan Harto (2016) mengatakan jika secara parsial rasio *leverage* yang merupakan proksi variabel tekanan berpengaruh positif signifikan dalam pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan. Penelitian Agustina dan Pratomo (2019) mengatakan jika secara parsial rasio *leverage* yang merupakan proksi variabel tekanan berpengaruh negatif signifikan dalam pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan. Hasil

penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Bawekes (2018) yang mengatakan jika secara parsial rasio *leverage* yang merupakan proksi variabel tekanan tidak berpengaruh dalam pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan.

Menurut Wardhani (2018) Suatu kejadian yang menyebabkan seseorang untuk melaksanakan *fraud* di suatu perusahaan disebut dengan faktor peluang. *Public Company Accounting Oversight* (2017) mengungkapkan bahwa peluang dapat muncul dikarenakan adanya andil dari komite audit atas ketidakefektifan pengawasan. Komite audit independen perusahaan bersumber dari pihak luar. Ketidakefektifan pengawasan komite audit independen di perusahaan dapat terjadi dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang mereka miliki terkait bisnis yang dikelola perusahaan, selain itu kemungkinan mereka mempunyai tanggungjawab yang sama di perusahaan yang lain, sehingga dapat meningkatkan terbukanya peluang bagi manajemen perusahaan untuk melakukan kecurangan (Alwi, dkk., 2014). Ketidakefektifan pengawasan yang dilakukan komite audit independen akan memberikan peluang yang semakin besar kepada perusahaan dalam melakukan manipulasi laporan keuangan (Harahap, dkk., 2017). Penggunaan proksi persentase jumlah komite audit independen ini mengacu kepada hasil penelitian Agustina dan Pratomo (2019), Septriani dan Handayano (2018) dan Alwi, dkk. (2014) mengatakan jika secara parsial persentase jumlah komite audit independen yang merupakan proksi variabel peluang berpengaruh positif signifikan dalam pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini berbeda dengan Handoko dan Ramadhani (2017) dan Prasetyo (2014) yang mengatakan jika secara parsial

persentase jumlah komite audit independen yang merupakan proksi variabel peluang tidak berpengaruh dalam pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan.

Rasionalisasi adalah sikap pembenaran timbul pada pikiran pelaku kecurangan saat praktik kecurangan telah terjadi pada perusahaan, pelaku kecurangan menganggap jika praktik kecurangan yang telah dilakukannya tersebut bukan merupakan sebuah kecurangan melainkan suatu hal yang menjadi haknya, para pelaku kecurangan merasa bahwa mereka telah berjasa besar dalam kemajuan perusahaan tempat mereka bekerja (Priantara, 2013). Karakter dan sikap yang dimiliki individu ataupun kelompok merupakan bagian yang dapat menggambarkan rasionalisasi. Penyebab terjadinya rasionalisasi salah satunya adalah tekanan, sedangkan lingkungan dianggap sebagai pemicu dari proses rasionalisasi tindakan kecurangan (Afifah, 2019).

Pada penelitian ini pergantian akuntan publik merupakan proksi variabel rasionalisasi. Pada perusahaan, tugas untuk mengawasi serta memeriksa laporan keuangan yang sudah selesai disusun perusahaan dilakukan oleh akuntan publik. Akuntan publik dapat mengendus informasi terkait perusahaan yang telah terindikasi melaksanakan kecurangan. Perusahaan yang terlibat kecurangan pelaporan keuangan umumnya sering melaksanakan pergantian akuntan publik dengan tujuan untuk memperkecil kemungkinan pendeteksian oleh akuntan publik yang lama dengan anggapan bahwa akuntan publik yang baru belum memahami keadaan perusahaan dengan baik dan sebagai bentuk usaha perusahaan untuk menghapus jejak (*fraud trail*) kecurangan yang diperoleh auditor sebelumnya (Wardhani, 2018. Tessa dan Harto, 2016. dan

Siddiq, dkk., 2017). Penggunaan proksi pergantian akuntan publik ini mengacu kepada hasil penelitian Siddiq, dkk. (2017) dan Noorjamil (2019) yang mengatakan jika secara parsial pergantian akuntan publik yang merupakan proksi variabel rasionalisasi berpengaruh positif signifikan dalam pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Agustina dan Pratomo (2019) dan Bawekes (2018) Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa secara parsial pergantian akuntan publik yang menjadi proksi variabel rasionalisasi tidak berpengaruh dalam pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan.

Seseorang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kecurangan pelaporan keuangan pada *pentagon fraud* disebut dengan faktor kompetensi. Pergantian direksi dapat dinilai mampu untuk memberikan gambaran mengenai kompetensi yang dimiliki oleh direksi yang bisa menyebabkan terjadinya *stress period* sehingga bisa menyebabkan semakin besarnya peluang manajemen perusahaan untuk terlibat kecurangan pelaporan keuangan (Wardhani, 2018). Pergantian direksi juga dilakukan sebagai upaya perusahaan untuk mengurangi eektivitas dari kinerja manajemen, hal ini dikarenakan manajemen membutuhkan periode yang lebih lama agar dapat menyesuaikan diri dengan kinerja serta kebiasaan dari direksi yang baru (Septiani dan Handayanti, 2018). Penggunaan proksi pergantian direksi dalam pendeteksian kecurangan ini mengacu kepada hasil penelitian Manurung dan Hardika (2015) dan Noorjamil (2019) mengatakan jika secara parsial pergantian direksi yang menjadi proksi variabel kompetensi berpengaruh positif signifikan dalam pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini berbeda dengan Agustina

dan Pratomo (2019) dan Bawekes (2018) yang mengatakan jika secara parsial pergantian direksi yang menjadi proksi variabel kompetensi tidak berpengaruh dalam pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan.

Arogansi merupakan sikap congkak atau sombong yang dimiliki seseorang yang disebabkan oleh adanya sifat *self interest* atau kepentingan diri sendiri yang semakin besar yang dapat meningkatkan sifat arogansi seseorang semakin besar (Faradiza, 2018). Pelaku *fraud* menganggap bahwa dirinya merasa bebas dari peraturan, kebijakan serta kontrol internal perusahaan sehingga mereka tidak merasa bersalah telah melakukan kecurangan pelaporan keuangan (Bawekes, 2018). Sifat arogansi CEO yang tinggi dapat menyebabkan kecurangan pelaporan keuangan dapat terjadi, hal tersebut dikarenakan CEO yang mempunyai arogansi yang tinggi dapat menyebabkannya melakukan berbagai cara untuk melindungi status, kedudukan serta jabatan yang dimilikinya, salah satunya dengan melakukan kecurangan pelaporan keuangan. CEO yang tidak mau untuk kehilangan jabatan serta status yang dimilikinya biasanya akan lebih sering menunjukkan kepada publik terkait jabatan serta status yang mereka miliki di laporan tahunan (Septriani dan Handayani, 2018). Penelitian Tessa dan Harto (2016), Bawekes (2018), dan Noorjamil (2019) mengatakan jika secara parsial frekuensi jumlah foto CEO yang merupakan proksi variabel arogansi berpengaruh positif signifikan dalam pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini berbeda dengan Agustina dan Pratomo (2019) yang mengatakan jika secara parsial frekuensi jumlah foto CEO yang menjadi variabel arogansi tidak berpengaruh dalam pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan.

Penelitian mengenai pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan memakai *pentagon fraud* pada sektor BUMN berdasarkan pada penelitian Rusmana dan Tanjung (2019) dalam penelitian tersebut menggunakan 13 sampel BUMN di BEI periode 2015-2017. Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan yakni (1) Memakai metode analisis data yang berbeda, jika sebelumnya memakai analisis regresi linear berganda namun pada penelitian ini memakai analisis regresi logistik, hal ini karena variabel terikatnya memakai data katagorial berupa *dummy*. (2) Menggunakan proksi variabel bebas yang berbeda pada variabel peluang, yang sebelumnya menggunakan rasio komisaris independen, sedangkan pada penelitian ini memakai persentase jumlah komite audit independen. (3) Menggunakan proksi variabel terikat yang berbeda yang sebelumnya *earnings management*, sedangkan dalam penelitian ini memakai model *Fraud Score (f-score)* yang adalah tekni penelitian berkaitan dengan risiko kecurangan pelaporan keuangan yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Sedangkan persamaannya yakni, (1) Menggunakan proksi variabel bebas yang sama pada variabel Tekanan yakni Rasio *leverage*, rasionalisasi yakni pergantian akuntan publik, kompetensi yakni pergantian direksi dan arogansi yakni frekuensi jumlah foto CEO. (2) Menggunakan sektor penelitian yang sama yakni BUMN yang terdaftar di BEI.

Peneliti memilih BUMN yang terdaftar di BEI sebagai sektor yang diteliti karena masih sedikit yang melaksanakan pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan pada BUMN yang terdaftar di BEI dan masih terjadi perbedaan hasil penelitian dari beberapa penelitian terdahulu. Budianto (2018) melakukan pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan di BUMN dengan memakai

triangle fraud dengan hasil yang menjelaskan jika hanya ROA yang merupakan proksi variabel tekanan yang bisa dipakai dalam pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan sedangkan stabilitas keuangan yang dinilai dengan perubahan aset dan *external pressure* yang dihitung dengan rasio arus kas bebas merupakan tproksi variabel tekanan lainnya tidak dapat mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan. Begitu juga dengan *board directors out* yang merupakan proksi variabel peluang dan KAP yang merupakan proksi variabel rasionalisasi tidak bisa digunakan dalam peneteksian kecurangan pelaporan keuangan.

Hasanah (2020) memakai *diamond fraud* untuk pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan di BUMN mengatakan jika stabilitas keuangan yang merupakan proksi variabel tekanan berpengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan sedangkan tekanan eksternal dan terget keuangan yang menjadi proksi variabel tekanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Kondisi industri yang merupakan prokso variabel peluang berpengaruh negatif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Partisipasi total akrual yang merupakan variabel rasionalisasi dan pengalaman internasional anggota dewan yang merupakan proksi variabel kompetensi tidak berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan di BUMN. Rusmana dan Tanjung (2019) memakai *pentagon fraud* untuk pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan di BUMN dengan hasil yang menunjukkan bahwa rasio *leverage* yang merupakan proksi variabel tekanan yang mempengaruhi kecurangan pelaporan keuangan. Rasio komisioner independen yang merupakan proksi variabel peluang, pergantian auditor yang merupakan proksi variabel rasionalisasi, pergantian direktur yang merupakan proksi variabel

kesempatan, dan gambar CEO yang merupakan proksi variabel arogansi tidak terbukti mempengaruhi kecurangan laporan keuangan. Hingga saat ini masih sedikit penelitian yang memakai *pentagon fraud* yang adalah penyempurnaan dari *diamond fraud* dan *triangle fraud* dalam melakukan pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan di BUMN, padahal kasus kecurangan pelaporan keuangan di BUMN itu sendiri masih sering terjadi. Berdasarkan uraian latar belakang mengenai kasus/fenomena mengenai kecurangan dalam pelaporan keuangan yang telah dijelaskan di atas, masih terdapat *research gap* dari hasil penelitian-penelitian terdahulu serta penggunaan proksi dari variabel, populasi serta sampel yang berbeda dari berbagai penelitian sebelumnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **“Pendeteksian Kecurangan Pelaporan Keuangan Dengan Menggunakan *Pentagon Fraud* Pada BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi permasalahan pada penelitian, yakni :

1. *Association of Certified Fraud Examiner* mengklasifikasikan *fraud* kepada 3 kategori utama yakni korupsi, penyalahgunaan asset, dan kecurangan laporan keuangan. Hasil survei yang dilaksanakan oleh ACFE tahun 2016 di Indonesia, Lembaga yang paling dirugikan oleh *Fraud* adalah 81,2% berasal dari pemerintah, kemudian 8,1% perusahaan negara/BUMN dan 2,3% berasal dari lembaga swasta. Sedangkan untuk sektor industri yang paling dirugikan akibat *fraud*

yakni 58,8% berasal dari perusahaan-perusahaan berstatus BUMN (ACFE Indonesia, 2016).

2. Thohir (2020) menyatakan bahwa saat ini sering terjadi manipulasi laporan keuangan atau window dressing pada BUMN. Badan Usaha seolah-olah meraih keuntungan tetapi nyatanya tidak memiliki dana sesuai dengan apa yang mereka laporkan pada laporan keuangan.
3. Terdapat empat BUMN yang terdaftar di BEI yang melaksanakan kecurangan pelaporan keuangan yaitu PT Garuda Indonesia Persero TBK tahun 2018 (Hartomo, 2019), PT Timah Persero TBK tahun 2015 (Soda, 2016), PT Indofarma Persero TBK tahun 2001 (*Finance*, 2004) dan PT Kimia Farma Persero TBK tahun 2001 (Syahrul, 2003).
4. Ada beberapa teori yang bisa dipakai dalam pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan yakni dengan memakai *triangle fraud*, *diamond fraud*, dan *pentagon fraud*.
5. Mengenai pengaruh masing-masing proksi variabel dalam penelitian yang berkaitan dengan pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan dengan memakai teori *pentagon fraud* masih terdapat perbedaan hasil penelitian.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini akan membahas mengenai pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan menggunakan teori *pentagon fraud* pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang yakni;

1. Apakah tekanan berpengaruh positif dalam pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan?
2. Apakah peluang berpengaruh positif dalam pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan?
3. Apakah rasionalisasi berpengaruh positif dalam pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan?
4. Apakah kompetensi berpengaruh positif dalam pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan?
5. Apakah arogansi berpengaruh positif dalam pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan?
6. Apakah tekanan, peluang, rasionalisasi, kompetensi dan arogansi secara simultan berpengaruh dalam pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas yakni :

1. Untuk menganalisis pengaruh tekanan dalam pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh peluang dalam mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan.

3. Untuk menganalisis pengaruh rasionalisasi dalam pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan.
4. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi dalam pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan.
5. Untuk menganalisis pengaruh arogansi dalam mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan.
6. Untuk menganalisis pengaruh tekanan, peluang, rasionalisasi, kompetensi dan arogansi secara simultan dalam pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini manfaat yang diharapkan yakni :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan melalui hasil penelitian ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu, wawasan mahasiswa dan memberikan literatur tambahan yang dapat digunakan sebagai acuan oleh perusahaan ataupun penelitian lainnya. Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini juga diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman serta gambaran lebih mendalam mengenai cara pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan dengan menggunakan teori *pentagon fraud*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan hasil penelitian ini bisa dipakai bagi mahasiswa sebagai rujukan tambahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan informasi untuk memperluas wawasan.

b. Bagi BUMN

Diharapkan hasil penelitian ini diharapkan bisa dipakai oleh BUMN sebagai pertimbangan untuk melindungi *principals* dan sebagai bentuk pertanggungjawaban agen kepada *principals* (*stakeholder*). Manajemen BUMN memiliki tugas untuk memberikan informasi serta dapat lebih mengetahui tentang faktor apa saja yang dapat memberikan pengaruh pada praktik kecurangan pelaporan keuangan yang terjadi di suatu perusahaan sehingga *stakeholder* (*principals*) bisa memperkecil kesalahan saat pengambilan keputusan.

c. Bagi *Stakeholder*

Hasil penelitian dapat dipakai sebagai alat yang bisa memberikan informasi untuk *stakeholder* saat menganalisa investasi pada badan usaha/perusahaan. selain itu juga dapat digunakan dalam pendeteksian kemungkinan terjadinya kecurangan pelaporan pada suatu perusahaan, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian serta dapat digunakan dalam mempertimbangkan investasinya apakah sudah berasa di tangan yang tepat atau belum.